



Warga Kampung Bayam Tagih Janji DKI

JAKARTA, KOMPAS — Lebih dari 50 warga Kampung Bayam memprotes PT Jakarta Properindo (Perseroda) atau Jakpro di depan pintu masuk Kampung Susun Bayam, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (21/11/2022). PT Jakpro dituntut segera membiarkan mereka menempati kampung susun yang telah dijanjikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk warga korban gusuran proyek Jakarta International Stadium.

Sebelumnya, PT Jakpro sudah menemui warga dan menjelaskan, mereka bisa menempati unit pada 20 November 2022. Namun, hingga kemarin, belum ada komunikasi dari pihak PT Jakpro terkait pemindahan warga. Hal ini memicu kemarahan warga Kampung Bayam mengingat nasib mereka terkandung-kandung sejak tiga tahun lalu saat penggusuran dimulai.

Sebagai solusi atas penggusuran, Pemprov DKI menjanjikan pembangunan rumah susun yang akan dikelola PT Jakpro. Pada pertengahan Oktober lalu, Gubernur DKI kala itu, Anies Baswedan, telah meresmikan hunian tersebut.

Warga Kampung Bayam, Sopyan (66), berharap agar proses pemindahan ke Kampung Susun Bayam dipercepat. Penjual agar-agar pikul ini sekarang mengontrak rumah di daerah lain dengan biaya Rp 1,5 juta per

bulan. Dari pendapatan kotor Rp 100.000 per hari, ia harus menghidupi ketiga anak dan istrinya.

"Saya inginnya kembali ke kampung susun di sini dengan harapan biayanya bisa lebih murah," tuturnya dengan suara bergetar menahan tangis.

Penggusuran ini juga berdampak pada hilangnya mata pencarian masyarakat. Warga Kampung Bayam, Riska (53), mengaku sebelumnya ia menjual makanan di gerobak. Semenjak digusur, ia kehilangan gerobak dan tidak memiliki mata pencarian lain. Di tempat baru yang ia sewa juga tidak ada ruang untuk berjualan.

Warga Kampung Bayam, Suryono, menceritakan, ia selalu mengikuti progres pembangunan Kampung Susun Bayam. Setelah digusur, masyarakat menyebar dan menyewa tempat tinggal di sejumlah daerah sembari menunggu selesainya kampung susun yang dijanjikan. Warga kini dijanjikan bisa menempati kampung susun pada Maret 2023.

Community Development Specialist PT Jakpro Hifdzi Mujtahid menjelaskan, proses menempatkan warga ke dalam unit kampung susun tidaklah mudah. Ia mengaku terdapat beberapa hal terkait administrasi, perizinan, hingga hal-hal teknis, seperti biaya sewa yang harus dikaji dan dipenuhi.

"Perkiraan tarif sewa Rp 500.000-Rp 700.000 untuk tipe rumah 36. Kemarin, kami melakukan survei, kemampuan masyarakat membayar sewa Rp 328.000 per bulan, sedangkan keinginan mereka membayar Rp 150.000 per bulan. Hal-hal seperti ini yang perlu kami koordinasikan dengan Pemprov DKI, selain perizinan dengan dinas-dinas terkait," ujarnya.

Gugun Muhammad dari Urban Poor Consortium menyatakan, masalah administrasi ini seharusnya diselesaikan PT Jakpro dan tidak membebani warga. Namun, penggusuran ini telah membebani warga dengan kompensasi yang tidak cukup.

Selain itu, ia menambahkan, warga Kampung Bayam juga memiliki kebutuhan mendesak atas hunian yang layak. Hal ini terlepas dari kondisi bahwa Kampung Bayam bukan merupakan permukiman prioritas penataan, seperti yang diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.

Ketua Koperasi Persaudaraan Warga Kebun Bayam (PWKB) Asep menceritakan, Kampung Susun Bayam memiliki tiga gedung untuk 135 keluarga. Hingga saat ini, telah terdaftar 123 keluarga yang akan menempati kampung susun tersebut. (Z14)